

## PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERKAIT PERJANJIAN PARIS TAHUN 2021

**Aulia Natasha<sup>1</sup>, Apriwan<sup>2</sup>, Rifki Dermawan<sup>3</sup>**

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Andalas, Kota Padang, Indonesia

E-mail: <sup>1</sup>aulianatasya59@gmail.com, <sup>2</sup>apwiwan@soc.unand.ac.id,  
<sup>3</sup>rifkidermawan@soc.unand.ac.id

### **Abstrak**

This study aims to analyze the factors causing changes in US policy regarding the Paris Agreement in 2021. The US policy of returning to the Paris Agreement in 2021 has an impact on various aspects, because it means strengthening global efforts to reduce the earth's temperature to 1.5°C, but on the other hand others are detrimental to the United States economy because they cause production restrictions in various American industrial sectors. This policy is often focused on changing leadership events, because this plan has been carried out by Biden since the campaign period. Through this research, the authors analyze other causes from the domestic side that led to the change in policy by using the parameters of foreign policy changes thought by Spyros Blavoukos and Dimitris Bourantonis. The research method used is qualitative with descriptive analytical research type. Based on the ideas of Blavoukos and Bourantonis, there are two things from the domestic side that influence countries in changing their foreign policy, namely related to a country's political institutions as policy makers and advocacy groups that influence policy makers to change their foreign policy.

**Keywords:** United States of America, Foreign Policy, Domestic Structure, Paris Agreement on Climate Change

***Received Revised Published***

### **Pendahuluan**

Amerika Serikat merupakan salah satu aktor penting dalam isu perubahan iklim, hal ini karena Amerika Serikat adalah negara dengan tingkat emisi nomor dua terbesar di dunia, setelah Tiongkok. Menurut data yang dikutip dari *U.S Energy Information and Administration* pada tahun 2021, emisi gas Amerika mencapai angka 4,9 gigaton CO<sub>2</sub>. Menjadi salah satu negara dengan emisi paling banyak maka membuat kebijakan Amerika Serikat terhadap isu perubahan iklim seringkali berubah-ubah, hal ini disebabkan oleh komitmen mengikat yang ada pada sejumlah rezim perubahan iklim membatasi Amerika

Serikat untuk memaksimalkan laju produksi industri, sehingga ini merugikan Amerika Serikat secara ekonomi.

Pada tahun 2017, Presiden ke-45 Amerika Serikat, yakni Donald Trump mengumumkan rencana penarikan diri Amerika Serikat dari Rezim Perjanjian Paris. Menurut rezim perubahan iklim diratifikasi oleh mantan Presiden Barack Obama tersebut sangat merugikan perekonomian Amerika Serikat, komitmen mengikat yang ada pada Perjanjian Paris telah memaksa Amerika Serikat untuk tidak menghasilkan gas emisi di atas standar yang ditetapkan. Salah satu perusahaan yang terkena imbas dari komitmen ini yaitu perusahaan batu bara, sejak Amerika Serikat meratifikasi Perjanjian Paris di bawah pemerintahan Barack Obama, industri batu bara terus mengalami kemunduran, menurut data yang dikutip dari *US Energy Information Administration*, industri batu bara Amerika Serikat pada tahun 2016 turun sebanyak 18,8% dengan total produksi 728,4 juta ton saja, ini merupakan tingkat produksi terendah sejak tahun 1979. Melemahnya sektor industri batu bara berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja, menurunnya jumlah produksi pada sektor ini menyebabkan penurunan penyerapan jumlah tenaga kerja sebanyak 21,5% pada tahun 2016. Menurut data yang dikutip dari *National Economic Research Associates* jika Amerika Serikat terus melanjutkan komitmennya pada Perjanjian Paris maka setidaknya 2,7 juta pekerjaan akan hilang pada tahun 2025 dan hal ini akan merugikan Amerika Serikat sebanyak 3 Triliun USD. Hal inilah akhirnya yang melatarbelakangi kebijakan Amerika Serikat menarik diri dari Perjanjian Paris.

Pada tahun 2021 Amerika Serikat dibawah pemerintahan Presiden Joe Biden memutuskan untuk kembali ke Perjanjian Paris, kembalinya Amerika Serikat ke rezim perubahan iklim mengembalikan kepercayaan global untuk memerangi isu perubahan iklim mengingat posisi Amerika Serikat sebagai salah satu negara dengan emisi gas paling besar di dunia, selain itu dengan kembalinya Amerika Serikat yang merupakan negara dengan perekonomian *super power* berarti

menambah pendanaan bagi rezim perubahan iklim tersebut untuk memaksimalkan tujuannya mengurangi suhu bumi menjadi 1,5°C.

Perubahan kebijakan Amerika Serikat terkait Perjanjian Paris tahun 2021 selama ini cenderung dititikberatkan kepada peristiwa pergantian kepemimpinan, mengingat rencana ini sudah diumumkan oleh Presiden Joe Biden sejak masa kampanye dengan tujuan untuk meneruskan komitmen kebijakan ekonomi hijau yang dahulu dibawa oleh mantan Presiden Barack Obama. Penulis ingin meneliti alasan lain dibalik perubahan kebijakan ini dengan mempertimbangkan struktur domestik seperti lembaga politik sebagai pembuat kebijakan dan kelompok advokasi sebagai pemberi pengaruh dalam perubahan kebijakan Amerika Serikat terkait Perjanjian Paris tahun 2021.

### **Metode**

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif-analisis. Pendekatan kualitatif sendiri merupakan jenis pendekatan yang menghasilkan data-data yang tidak dapat dicapai dengan cara pengukuran. Jenis penelitian deskriptif-analisis sendiri digunakan untuk mengelaborasi persoalan yang dikaji secara deskriptif dengan menggunakan analisis dari konsep yang telah dipilih penulis. Jenis dan metode ini dipilih untuk menjelaskan kepada pembaca apa saja yang menjadi alasan dan faktor baik itu dari sisi domestik yang membuat Amerika Serikat merubah kebijakannya terkait Perjanjian Paris pada tahun 2021.

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan untuk menunjang penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan jenis pengumpulan data melalui bahan bacaan seperti buku, dokumen jurnal, arsip dan kajian literatur yang berhubungan dan tersedia di perpustakaan. Adapun untuk pengumpulan data akan dihimpun [Whitehouse.gov](http://Whitehouse.gov) dan [USA.gov](http://USA.gov) dan [unfccc.int](http://unfccc.int) sebagai situs resmi pemerintah Amerika Serikat dan Perjanjian Paris. Selain itu data juga akan didapatkan dari sumber bacaan buku dan jurnal ilmiah,

Adapun sumber bacaan utama terkait buku dan jurnal ilmiah yang menjadi rujukan data penulis dalam melihat isu lingkungan dan perubahan iklim negara Amerika Serikat yaitu *Climate Change and American Foreign Policy* karangan Paul G. Harris dan *American Journal of Climate Change*.

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **Parameter Struktural Domestik Mempengaruhi Perubahan Kebijakan Amerika Serikat terkait Perjanjian Paris tahun 2021**

#### **Dominasi Partai dalam Lembaga Politik Amerika Serikat**

Dalam politik Amerika Serikat, terdapat dua partai besar yang memberikan dominasi kuat dalam pemerintahan. Partai pertama merupakan Partai Republik yang dibentuk tahun 1854 di Ripon Wisconsin. Republik dikenal sebagai partai konservatif karena partai ini cenderung meneruskan tradisi pendahulunya dengan nilai-nilai yang tradisional, selain itu Partai Republik juga memprioritaskan keamanan nasional Amerika daripada partisipasi Amerika di dunia internasional. Sebagai partai yang konservatif dan memprioritaskan keamanan nasional Amerika maka orientasi kebijakan Partai Republik cenderung berbasis pasar dengan memprioritaskan kemajuan ekonomi dengan intervensi pemerintah yang minim, oleh karena itu Republikan dikenal sebagai partai yang skeptis terhadap isu-isu multilateral lainnya seperti isu kemanusiaan dan perubahan iklim.

Selain Partai Republik, partai lainya yang mendominasi politik Amerika yaitu Partai Demokrat. Partai Demokrat dibentuk tahun 1828 oleh Andrew Jackson Martin Van Buren, berbeda dengan Partai Republik yang konservatif, Partai Demokrat justru beraliran liberal, yang mana budaya politiknya didasarkan pada keyakinan dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman, oleh karena itu Partai Demokrat juga menaruh perhatian terhadap isu-isu keamanan modern seperti isu kemanusiaan dan perubahan iklim. Menurut data yang dikutip dari *The Chicago Council on Global Affairs*, ditemukan bahwa dari

100% partisipan Demokrat yang mengikuti Survei, 82% percaya bahwa perubahan iklim adalah ancaman bagi Amerika Serikat dan harus segera diatasi, disisi lain dari 100% Republikan yang mengikuti survey, hanya 31% yang percaya bahwa pemerintah Amerika harus ambil peran dalam isu perubahan iklim.

Pada tahun 2021, Partai Demokrat memperoleh banyak kursi dalam pemerintahan dari pada periode sebelumnya, menurut laporan dari BBC Indonesia menyebutkan bahwa Partai Demokrat berhasil meraih kendali atas Badan Legislatif Amerika saat pemungutan suara tahun 2021 lalu dengan kemenangan tipis di negara bagian Georgia. Menurut data yang dikutip dari situs resmi *House of Government Amerika*, setelah pemilu Partai Demokrat berhasil menguasai senat dengan perbandingan 50 kursi diisi oleh koalisi Republik, 47 kursi diisi oleh koalisi Demokrat yang ditambah dengan tiga kursi independen yang mana mereka kaukus dengan Partai Demokrat, selain itu pelantikan tiga senator utama yaitu Jon Ossof, Raphael Warnock dan Alex Padilla yang diusung oleh partai Demokrat menambah dominasi Demokrat di Senat Amerika Serikat. Selain menguasai senat, Demokrat juga menguasai *house of representative*, dari 435 anggota *house of representative*, Demokrat menduduki 222 kursi, sementara Republik hanya menduduki 215 kursi saja. Dominasi Demokrat dalam lembaga politik Amerika Serikat sejak tahun 2021 telah mendorong Amerika Serikat memiliki arah kebijakan yang berbeda daripada periode sebelumnya yang didominasi oleh Partai Republik, hal ini terlihat dari sejumlah respon yang Partai Demokrat berikan terhadap isu perubahan iklim.

Pada saat Demokrat menguasai kongres ke-117 sejak 2021 lalu, beberapa Senator Demokrat mengajukan Rancangan Undang-Undang *Build Back Better Act*. Adapun *Build Better Act* merupakan Rancangan Undang-Undang perubahan iklim dan kebijakan sosial dengan anggaran dana sebesar 3,5 triliun USD, namun setelah dinegosiasikan ulang rancangan ini menjadi 2,2 triliun

USD. Rancangan Undang-Undang *Build Better Act* mendapatkan penolakan dari partai Republik, dari 50 Senat Republik yang ada, mereka semua menolak mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang tersebut, Senator Lindsey Graham, Republikan asal South Carolina menyatakan jika beberapa poin dari *Build Better Act* mungkin dapat diterima, tapi perubahan iklim adalah agenda yang paling ditentang oleh Republik.

Meskipun Demokrat menguasai Badan Legislatif, *Build Better Act* batal disahkan karena Senator Joe Manchin dari Virginia Barat menolak dukungan terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang tersebut, menurutnya perlu perundingan yang lebih matang terkait ruang lingkup dan biaya yang ada dalam Rancangan Undang-Undang *Build Better Act*, hal ini membuat jumlah suara untuk pengesahan Undang-Undang tidak mencukupi. Penolakan Joe Manchin membuat *Built Better Act* dinegosiasikan ulang, sejalan dengan itu Senat Demokrat semakin kokoh mendesak agar Rancangan Undang-Undang perubahan iklim tetap disahkan dengan urgensi pemanasan global membutuhkan aksi yang lebih serius daripada hanya sekedar meratifikasi Perjanjian Paris yang sewaktu-waktu dapat dibatalkan dengan mudah oleh pemerintahan eksekutif selanjutnya. Setelah melakukan Amandemen panjang pada *Built Better Act* akhirnya pada Agustus 2021 *house of representative* meloloskan *Inflation Reduction Act* sebagai undang-undang perubahan iklim yang kemudian secara resmi ditandatangani Presiden Joe Biden pada 16 Agustus 2021.

Disahkannya *Inflation Reduction Act* sebagai undang-undang perubahan iklim menunjukkan kemenangan Demokrat dalam badan pemerintahan Amerika, Dominasi kuat Demokrat dalam badan pemerintahan telah membuat Amerika memiliki gaya kebijakan yang berbeda daripada periode-periode sebelumnya, sehingga dengan begitu dapat disimpulkan pula faktor penyebab perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait Perjanjian Paris tahun

2021 adalah pergantian kepemimpinan dan dominasi Partai Demokrat dalam lembaga politik Amerika Serikat pada tahun 2021.

### **Negara Bagian di Agenda Perubahan Iklim Amerika Serikat**

Amerika Serikat merupakan negara republik federal yang terdiri atas 50 negara bagian. Bentuk pemerintahan negara Amerika yang berupa republik federal membuat pemerintah federal berbagi kekuasaan dengan pemerintah negara bagian, yang mana negara-negara bagian turut mempengaruhi pemerintah federal untuk mengambil kebijakan. Pada tahun 2017, Amerika Serikat di bawah rezim Donald Trump memutuskan untuk memberhentikan komitmennya terhadap Perjanjian Paris. Kebijakan tersebut mendatangkan protes dari negara-negara bagian di Amerika Serikat, yang mana mereka membentuk koalisi untuk memproklamirkan *We Are Still In*. Koalisi ini terdiri atas dua ratus walikota, tiga puluh gubernur, perusahaan swasta, ahli dan universitas yang bergabung dengan *United States Climate Alliance* (USCA).

Sejak terbentuk pada tahun 2017, USCA kerap melakukan kegiatan mitigasi perubahan iklim untuk mendorong negara federal Amerika Serikat agar membatalkan rencana keluar dari Perjanjian Paris. Adapun kegiatan USCA mencakup *cap and trade carbon*, penetapan target pengurangan emisi, kebijakan penerapan transportasi rendah emisi dan rencana penggunaan energi terbarukan. Meskipun Presiden Trump tidak menunjukkan rencana untuk membatalkan rencana keluarnya Amerika Serikat terhadap Perjanjian Paris sejak tahun 2017, namun USCA terus memaksimalkan upaya agar kebijakan untuk keluar dari rezim perubahan iklim tersebut dibatalkan. Beberapa kegiatan yang dilakukan USCA, seperti menyebarkan petisi kepada publik sejak Mei 2017, yang mana hal ini dilakukan dalam upaya untuk mendesak pemerintah federal, selain itu beberapa negara bagian USCA juga meningkatkan pengembangan transportasi rendah emisi dan rutin menggelar pertemuan dengan format *Global Climate Action Summit* dengan mengundang pemimpin level sub nasional dari seluruh dunia untuk memperlihatkan komitmen nyata mereka

kepada pemerintah federal Amerika dan dunia tentang aksi mitigasi isu perubahan iklim yang dilakukan negara-negara bagian di Amerika Serikat. Besarnya dukungan dari negara bagian terhadap aksi iklim telah mendorong Joe Biden sebagai kandidat calon Presiden membawa isu iklim sebagai salah satu isu penting dari empat isu utama dalam masa kampanyenya sejak tahun 2019, yang mana Biden berjanji akan mengembalikan Amerika ke rezim perubahan iklim untuk meneruskan komitmen ekonomi hijau dan mempromosikan jaringan nol emisi serta transisi energi bersih Amerika Serikat. Terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 2020 dengan kemenangan di negara bagian seperti California, New York, Virginia, Minnesota, Maryland, Arizona, New Mexico, Pennsylvania, Hawaii, Colorado, New Jersey, Oregon, Nevada dan lain-lain hingga mampu mengumpulkan 290 suara elektoral telah membawa Biden menepati janjinya untuk mengembalikan Amerika Serikat kembali ke Perjanjian Paris.

Setelah Perjanjian Paris resmi diratifikasi pada tahun 2021 oleh Presiden Joe Biden, dukungan negara bagian terhadap isu perubahan iklim tetap berlanjut, di Michigan, Minnesota, Wisconsin, Pennsylvania, New York, Maryland dan beberapa negara bagian lainnya membentuk gelombang hijau untuk aksi perubahan iklim, dalam hal ini mereka menuntut agar pemerintah federal segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang untuk perubahan iklim Amerika Serikat, bahkan beberapa negara bagian seperti Michigan, Minnesota dan Maryland berjanji akan memproduksi 60% sumber listrik menggunakan sumber energy terbarukan. Tingginya komitmen negara-negara bagian terhadap rencana mitigasi iklim global menunjukkan bahwa sebagian besar negara bagian Amerika menginginkan pemerintah federal untuk mengambil langkah yang lebih besar untuk isu perubahan iklim, hal ini adalah sesuatu yang dipertimbangkan oleh pemerintah federal karena negara bagian setidaknya menyumbang hampir 40% dari Produk Domestik Bruto Amerika Serikat.



Berdasarkan penjabaran diatas dapat disimpulkan jika dukungan dari negara bagian merupakan salah satu pendorong kembalinya Amerika Serikat ke Perjanjian Paris. Kemenangan Joe Biden pada pemilu Presiden 2020 di beberapa negara bagian seperti California, New Jersey, Oregon, Nevada, dan lain-lain hingga mampu memperoleh 290 suara electoral menunjukkan negara bagian menginginkan Presiden yang mampu membawa Amerika Serikat kembali ke Perjanjian Paris. Kembalinya Amerika ke Perjanjian Paris merupakan bentuk pemenuhan janji kampanye Biden terhadap negara bagian.

### **Kelompok Advokasi sebagai Pemberi Pengaruh**

Selain lembaga politik dan dorongan dari negara bagian, unit lainnya dalam level domestik yang memberikan pengaruh terhadap perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat adalah kelompok advokasi. Bentuk pemerintahan Amerika Serikat yang demokratis memungkinkan pertimbangan suara lain dalam pengambilan kebijakan luar negeri negara Amerika Serikat. Bagian dari kelompok advokasi yang memiliki pengaruh besar dalam pembuatan kebijakan Amerika Serikat adalah kelompok sosial ekonomi berupa *Non-Governmental Organization* atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dalam hal ini LSM memainkan peran dengan menyediakan informasi dan melakukan lobbying ke masyarakat dan pemerintah untuk memahami suatu isu yang sedang terjadi.

Sejak tahun 1990-an telah terjadi peningkatan signifikan terhadap jumlah LSM di Amerika, setidaknya hingga tahun 2021 telah terdapat 1,5 juta LSM yang aktif beroperasi. LSM di Amerika memiliki fokus berbeda-beda seperti hak asasi manusia, kesehatan, lingkungan, anak, wanita dan lain sebagainya. Walaupun memiliki fokus yang berbeda, sebagian besar diantaranya bekerjasama pada isu-isu terkait dengan pemanasan global, tidak hanya itu mereka bahkan membentuk jaringan khusus atau *climate change network* yang digunakan sebagai payung kegiatan untuk isu-isu perubahan iklim.

Terdapat tiga kategori besar kegiatan yang dilakukan oleh *climate change network* di Amerika, yaitu membangun koneksi dengan badan besar lain seperti *Worldwide Fund for Nature* dan *Greenpeace*, membangun wadah diskusi untuk penelitian bagi para ahli, dan yang terakhir sebagai kelompok advokasi yang mempengaruhi pemerintah dan publik dalam memahami isu perubahan iklim. Dalam kegiatannya sebagai kelompok advokasi, maka *climate change network* melakukan kerja advokasi kebijakan substansial dengan kantor-kantor pemerintah yang tersebar di Amerika, selain itu mereka juga melakukan kampanye untuk meningkatkan pemahaman publik tentang isu perubahan iklim. Pemahaman publik terhadap suatu isu diperlukan, karena hampir dari 62% kebijakan Amerika Serikat berjalan ke apa yang publik inginkan. Tingginya suara publik dalam proses pengambilan keputusan membuat beberapa isu digunakan oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai alat politik dalam pemilu untuk menarik suara publik.

Pada tahun 2017 Amerika mengumumkan akan menarik diri dari Perjanjian Paris. Keputusan Amerika untuk meninggalkan perjanjian Paris ini langsung mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Salah satu kecaman paling terkemuka datang dari *U.S Environmental Protection Agency* (EPA), dalam hal ini Christine Todd Whitman selaku salah satu tokoh penting EPA mendesak Trump untuk tidak melanggar komitmen Amerika terhadap Perjanjian Paris, protes Whitman ini diikuti oleh sekitar 70% publik Amerika yang menyatakan mendukung Perjanjian Paris. Meskipun Amerika Serikat tetap menarik diri dari Perjanjian Paris, namun pada tahun 2020 hampir 73% masyarakat Amerika percaya bahwa pemanasan global sedang terjadi dan pemerintah perlu mengambil tindakan tegas untuk membahas masalah ini. Hal ini akhirnya memancing Administrasi Biden untuk membawa isu perubahan iklim sebagai salah satu isu pokok yang akan dibenahi jika Biden terpilih sebagai presiden.

Dalam masa kampanyenya Biden juga mengumumkan rencana untuk membawa Amerika kembali ke Perjanjian Paris dan menuruskan kebijakan

ekonomi hijau yang sebelumnya dibawa oleh Barack Obama, hal ini mendapatkan tanggapan positif dari kelompok sosial ekonomi dan masyarakat Amerika, yang mana mereka menyatakan bahwa rencana tersebut akan didukung penuh untuk memperkuat rantai pasokan federal dan menghasilkan efisiensi yang lebih besar dalam mengurangi resiko perubahan iklim, adapun kelompok sosial ekonomi yang dimaksud diantaranya adalah, *Climate Risk and Clean Power, Environmental Defense Fund, Urban Ocean Lab, Climate and Energy Solution, American Farmland Trust, American Forest, The Climate Groups dan beberapa lainnya*. Terpilihnya Biden sebagai presiden pada tahun 2021 yang membawa Amerika Serikat kembali ke Perjanjian Paris menunjukkan jika secara tidak langsung Biden telah memperhitungkan suara publik yang dipengaruhi oleh kelompok-kelompok advokasi dalam kebijakannya.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis menggunakan *domestik structural of foreign policy change* hasil pemikiran Spyros Blavoukos dan Dimitris Bourantonis, ditemukan bahwa penyebab utama perubahan kebijakan Amerika Serikat terkait Perjanjian Paris adalah dominasi Partai Demokrat dalam lembaga politik Amerika Serikat. Dominasi Demokrat di badan Legislatif dan Eksekutif Amerika pada tahun 2021 telah mempermudah pengadopsian kebijakan lingkungan di Amerika Serikat dari pada periode sebelumnya. Selain dominasi dari Partai Demokrat, hal lainnya dari sisi domestik yang turut mempengaruhi perubahan kebijakan Amerika Serikat terkait Perjanjian Paris adalah dorongan dari negara bagian di Amerika Serikat dan desakan-desakan dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang berperan sebagai kelompok advokasi negara tersebut.

### **Daftar Pustaka**

- Blavoukos, Spyros, and Dimitris Bourantonis. "Identifying Parameters of Foreign Policy Change : A Synthetic Approach" (2009): 15–18.
- Choi. President Biden and Climate Change: Policy and Issues, n.d. <https://ssrn.com/abstract=3847183>.

Jr, Roger Pielke. "Climate Change as Symbolic Politics in the United States" 20,  
no. November (2017): 11–15.

NERA Economic Consulting Report on March 2017. Impacts of Greenhouse Gas  
Regulations On the Industrial Sector. Washington DC: NERA Economic  
Colsuting

Park, Jacob. "Polities of U.S Climate Change Policy." University of Minnesota  
Twin Cities, 2000.

Paul G. Harris. *Climate Change and American Foreign Poliey*. London, 2000.

The United Nations Framework Convention of Climate Change . Conference of  
The Parties (COP). Diakses melalui  
[https://unfccc.int/process/bodies/supreme-  
bodies/conference-of-the-  
parties](https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties) pada 10 Maret 2023

The United Nations Framework Convention of Climate Change. The Paris  
Agreement. Diakses melalui [https://unfccc.int/process-and-meetings/the-  
paris-agreement?](https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement?) pada 12 Maret 2023

Wahyuni, Henni. "Keluarnya Amerika Serikat Dari Kesepakatan Paris 2015."  
*Ejournal Ilmu Hubungan Internasional* 6, No. 4 (2018): 1787–1806.